



Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Republik Indonesia

BUKU I

RINGKASAN EKSEKUTIF



DOKUMEN INFORMASI KINERJA
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
KOTA CIMAHI TAHUN 2023



I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Permasalahan yang terjadi di lingkungan hidup merupakan hal yang wajar dialami karena salah satu bagian dari proses alam. Permasalahan lingkungan hidup menjadi isu global utama yang dihadapi saat ini. Secara umum, permasalahan lingkungan didorong oleh peningkatan populasi yang diikuti dengan semakin tingginya kepentingan antropogenik atas lingkungan. Aktivitas sosio-ekonomi, industri, pembangunan infrastruktur, pertanian perdagangan dan jasa memberikan dampak tersendiri bagi kelestarian lingkungan hidup, seperti keanekaragaman hayati, kualitas air, kualitas udara, perubahan cuaca dan iklim, banjir, kesehatan, dan lain – lain.

Manusia dengan segala kekuasaan yang dimiliki layak dikaitkan dengan masalah-masalah lingkungan hidup yang bermunculan. Pola pikir dan pandangan manusia terhadap pembangunan yang dilakukan tanpa memperhatikan faktor keseimbangan lingkungan pada akhirnya akan menimbulkan pencemaran lingkungan.

Pemerintah Kota Cimahi telah melakukan upaya-upaya pengelolaan lingkungan hidup sebagai bentuk kesadaran lingkungan dan respon atas permasalahan lingkungan yang terjadi. Hal ini berkaitan dalam salah satu misi Kota Cimahi yang keempat yaitu “mewujudkan pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan dan meningkatkan kualitas derajat kehidupan masyarakat yang berkeadilan”. Pemerintah Kota Cimahi menindaklanjuti upaya ini dengan mengembangkan sistem informasi lingkungan hidup sebagai sarana penyediaan data dan informasi lingkungan sekaligus menjadi alat yang berguna dalam menilai dan menentukan isu prioritas dan membuat rekomendasi bagi penyusun kebijakan dan perencanaan dalam mengelola lingkungan hidup dan menerapkan mandat pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan.



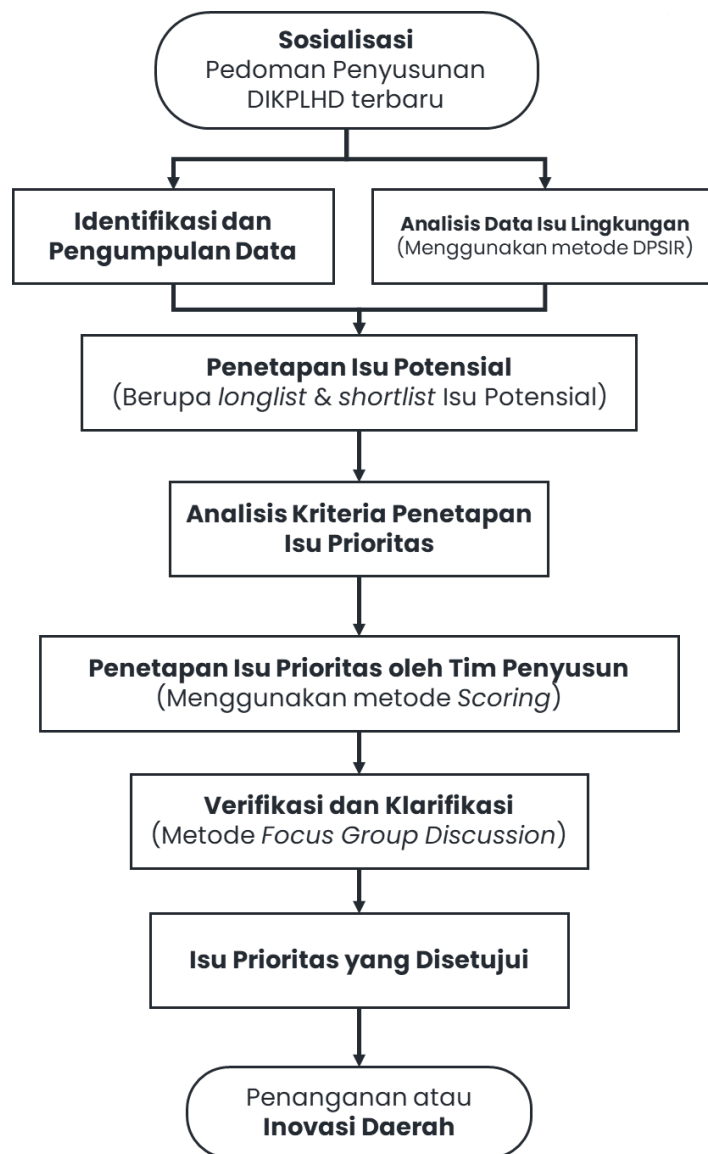
Pemerintah Kota Cimahi Menyusun Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) Tahun 2023. Penyusunan DIKPLHD ini merupakan bentuk akuntabilitas Pemerintah Kota Cimahi kepada publik. Penyusunan DIKPLHD Kota Cimahi didasari oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan disusun secara terpadu serta wajib dipublikasikan kepada masyarakat sehingga menjadi bagian penting bagi sarana penyediaan data pada sistem informasi lingkungan. DIKPLHD berisi pengumpulan dan pengolahan data, analisis data, dokumentasi kebijakan, dan penyajian informasi dengan model DPSIR (*Driving force, Pressure, State, Impact, and Response*) yang dapat digunakan sebagai dasar dalam melakukan pengelolaan/pengendalian isu lingkungan hidup yang terjadi atau sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan kebijakan lingkungan, sehingga dapat memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan mewujudkan salah satu misi dari Kota Cimahi

1.2 Gambaran Singkat Proses Penyusunan DIKPLHD Tahun 2023

Proses penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) Kota Cimahi dilakukan oleh tim kelompok kerja yang dibentuk oleh Walikota Cimahi yang keanggotaannya melibatkan unsur-unsur Perangkat Daerah (PD) terkait, Perguruan Tinggi, dan Lembaga Masyarakat. Sedangkan pembentukan tim penyusun DIKPLHD keanggotaannya dikukuhkan dengan Surat Keputusan Walikota Cimahi.

Tugas tim penyusun meliputi menginput dan menganalisis data status lingkungan hidup daerah yang telah diinventarisasi oleh Tim Kelompok Kerja menggunakan metode *Driving Force-Pressure-State-Response* (DPSIR), mengidentifikasi data dan mengevaluasi dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyusun Buku Ringkasan Eksekutif dan Buku Laporan Utama Informasi Kinerja Pengelolaan

Lingkungan Hidup Daerah Kota Cimahi tahun 2023. Langkah-langkah penyusunan DIKPLHD Kota Cimahi dapat dilihat pada **Gambar 1.1**.



Gambar 1 Diagram Alir Penyusunan Dokumen IKPLHD Kota Cimahi Tahun 2023

II. ANALISIS *DRIVING FORCE, PRESSURE, STATE, IMPACT, RESPONSE*

2.1 Tata Guna Lahan

Tujuan penataan ruang wilayah kota yaitu mewujudkan ruang wilayah Kota Cimahi sebagai Kota Inti dari Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Cekungan Bandung yang aman, nyaman, efisien dan berkelanjutan dengan

meningkatkan fungsi kota sebagai pusat jasa dan perdagangan serta pusat industri kreatif yang berbasis telematika. Adapun *framework* (kerangka kerja) analisis DPSIR isu tata guna lahan dapat dilihat pada **Gambar 2**.



Gambar 2 Framework DPSIR Isu Tata Guna Lahan

2.1.1 *Driving Force*

- Pertumbuhan Penduduk
- Kebijakan RTRW Kota Cimahi untuk Pemanfaatan Ruang
- Pertumbuhan Ekonomi

2.1.2 *Pressure*

- Alih Fungsi Lahan

2.1.3 *State*

- Kondisi Lahan di Kota Cimahi

Luas kawasan lindung di Kota Cimahi terdiri atas kawasan resapan air seluas 697,12 Ha; sempadan sungai seluas 258,26 Ha; ruang terbuka hijau seluas 4,17 Ha; kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan seluas 1.386,70 Ha; kawasan rawan tanah longsor seluas 1.061,25 Ha; kawasan rawan banjir seluas 181,72 Ha; dan kawasan rawan bencana seluas 1.242,97 Ha. Berdasarkan data tahun 2021, luas penggunaan lahan paling besar adalah luas lahan non pertanian yaitu 3.568 Ha yang digunakan untuk



pekarangan/lahan untuk bangunan dan halaman, industri dan lainnya.

b) Kerusakan Tanah di Lahan Kering

Terdapat 11 parameter uji pada tanah di Kota Cimahi, lokasi pengujian kualitas tanah di Tahun 2022 sejumlah 30 titik, yang terbagi kedalam beberapa kelurahan. Secara umum kondisi lahan kering di Kota Cimahi masih banyak yang memenuhi ambang kritis, hanya 2 parameter yang tidak memenuhi ambang kritis yaitu komposisi fraksi, dan derajat kelulusan air.

c) Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)

Perhitungan IKTL dilakukan dengan metode perhitungan IKLH berdasarkan S-318/PPKL/SET/REN.0/12/2020. Nilai IKTL di Kota Cimahi adalah 25,53, indeks kualitas tutupan lahan Kota Cimahi tahun 2022 memiliki angka di bawah target capaian RPJMD Kota Cimahi 2017-2022.

d) Lahan Kritis di Kota Cimahi

Luas lahan sangat kritis non hutan paling besar berada di Kecamatan Cimahi Utara dengan luas sebesar 439,99 Ha dan luas lahan kritis non hutan mencapai 84,95 Ha. Di Kecamatan Cimahi Selatan luas lahan sangat kritis non hutan mencapai 124,66 Ha dan luas lahan kritis non hutan sebesar 33,48 Ha. Luas lahan sangat kritis non hutan paling kecil berada di Kecamatan Cimahi Tengah yaitu 2,87 Ha dan luas lahan kritis non hutan sebesar 3,43 Ha.

2.1.4 Impact

- a) Kejadian Bencana
- b) Menurunnya *Biodiversity*
- c) Konflik Sosial
- d) Berkurangnya Lahan Produktif
- e) Penurunan Muka Air Tanah

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumihan Institut Teknologi Bandung (ITB), penurunan

muka tanah terjadi di sejumlah titik di Bandung, termasuk Cimahi dapat mencapai 1-20 cm per tahun. Kota Cimahi terutama di kawasan industri seperti di Kelurahan Leuwigajah mengalami penurunan muka tanah yang cukup signifikan.

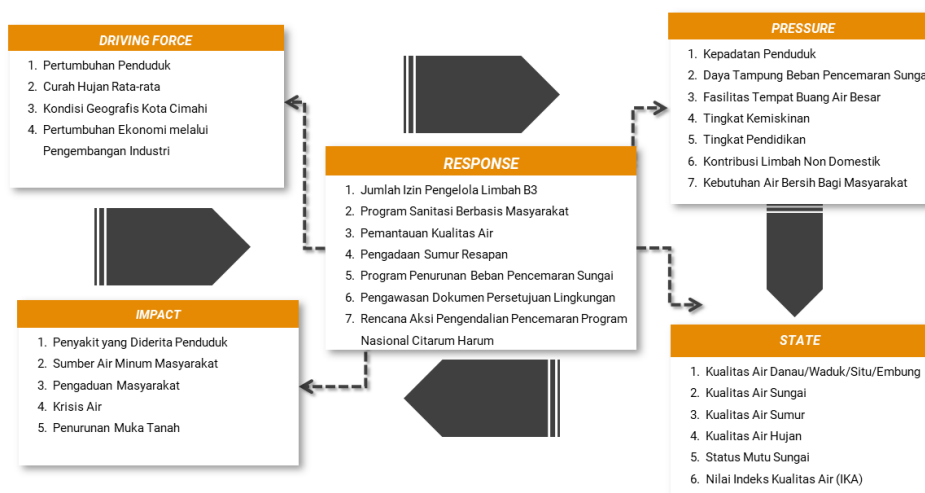
f) Kekurangan Air Bersih

2.1.5 Response

- Penghijauan dan Pengoptimalah RTH
- Pengembangan Agroforestri dan Ekowisata
- Penetapan Status Kerusakan Tanah
- Pengawasan Dokumen Persetujuan Lingkungan
- Biodiversity by Design*
- Pengembangan Ekowisata

2.2 Kualitas dan Kuantitas Air

Kota Cimahi terletak di hulu Sungai Citarum yang merupakan bagian dari Daerah Cekungan Bandung dan salah satu daerah lembah Sungai Citarum. Mata air yang ada di Kota Cimahi adalah Mata Air Cikuda dan Mata Air Cisintok. *Framework* atau kerangka kerja analisis isu kualitas air dapat dilihat pada **Gambar 3**.



Gambar 3 Framework DPSIR Isu Kualitas Air

2.2.1 Driving Force

- Pertumbuhan Penduduk



b) Curah Hujan Rata-rata di Kota Cimahi

Semakin tinggi curah hujan menyebabkan semakin tinggi debit air sungai. Curah hujan yang tinggi juga menyebabkan terjadinya banjir dan longsor. Curah hujan paling tinggi di Kota Cimahi terjadi pada Bulan Oktober yaitu mencapai 71 mm sedangkan curah hujan paling rendah terjadi di Bulan Agustus yaitu 13,8 mm.

c) Kondisi Geografis Kota Cimahi dan Potensi Beban Pencemarannya

d) Pertumbuhan Ekonomi Melalui Pengembangan Industri

2.2.2 Pressure

a) Kepadatan Penduduk

b) Daya Tampung Beban Pencemar Sungai

c) Fasilitas Tempat Buang Air Besar Tidak memadai

d) Tingkat Kemiskinan

e) Tingkat Pendidikan

f) Kontribusi Volume Limbah Industri

g) Kebutuhan Air Bersih Bagi Masyarakat

2.2.3 State

a) Kualitas Air Danau/waduk/situ/embung

Pemantauan kualitas air danau/waduk/situ/embung di Kota Cimahi dilakukan pada bulan April, dengan 6 lokasi titik pantau. Berdasarkan hasil pemantauan, konsentrasi parameter BOD, COD, *Fecal Coliform*, *Total Coliform*, dan fenol melebihi baku mutu. Sedangkan TSS, dan DO masih memenuhi baku mutu kualitas air danau PP 22 tahun 2021.

b) Kualitas Air Sungai

Pemantauan kualitas air sungai dilakukan pada Bulan Maret (bulan basah), Bulan Juni (bulan kering) dan Bulan September (bulan basah), terdapat 20 parameter yang diuji oleh UPTD Laboratorium Lingkungan DLH Kota Cimahi untuk menunjukkan kualitas air sungai di Kota Cimahi. Terdapat 5 sungai yang diuji kualitas air



sungainya, yaitu Sungai Cimahi, Sungai Cilember, Sungai Cisangkan, Sungai Cihaur, dan Sungai Cibeureum.

c) Status Mutu Air

Hasil pemantauan kelima sungai di Kota Cimahi menunjukkan jumlah titik pantau Cemar Berat sebanyak 6 titik, Cemar Sedang sebanyak 34 titik, dan Cemar Ringan sebanyak 5 titik.

d) Indeks Kualitas Air (IKA)

Indeks kualitas air Kota Cimahi tahun 2022 dihitung berdasarkan persentase jumlah titik pantau tiap status mutu terhadap total data terpantau. Berdasarkan hasil perhitungan, pada tahun 2022 indeks kualitas air sungai di Kota Cimahi bernilai 29,56 masih termasuk ke dalam klasifikasi buruk.

e) Kualitas Air Hujan

Pemerintah Kota Cimahi juga melakukan pemantauan pada kualitas air hujan di 4 (empat) titik pemantauan, yaitu industri, permukiman, perkantoran, dan transportasi. Berdasarkan hasil pemantauan parameter pH, nilai pH kualitas air hujan di Kota Cimahi berada di sekitar 6,3-6,9.

f) Kualitas Air Sumur

Pada tahun 2022, Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi menguji 30 titik air sumur dalam satu periode yang sama yaitu di Bulan Februari. Dari 30 titik sampel yang diuji, semua titik memiliki nilai *fecal coliform* yang melebihi baku mutu.

2.2.4 Impact

a) Krisis Air

b) Penyakit yang Diderita Masyarakat

c) Sumber Air Minum/Air Bersih

Berdasarkan data Pemenuhan Kebutuhan Air Bersih Kota Cimahi Tahun 2022, jumlah rumah tangga dan sumber air minum di Kota Cimahi didominasi bersumber dari air sumur sebanyak 97.579 SR atau 75% dari total SR yang ada di Kota Cimahi.

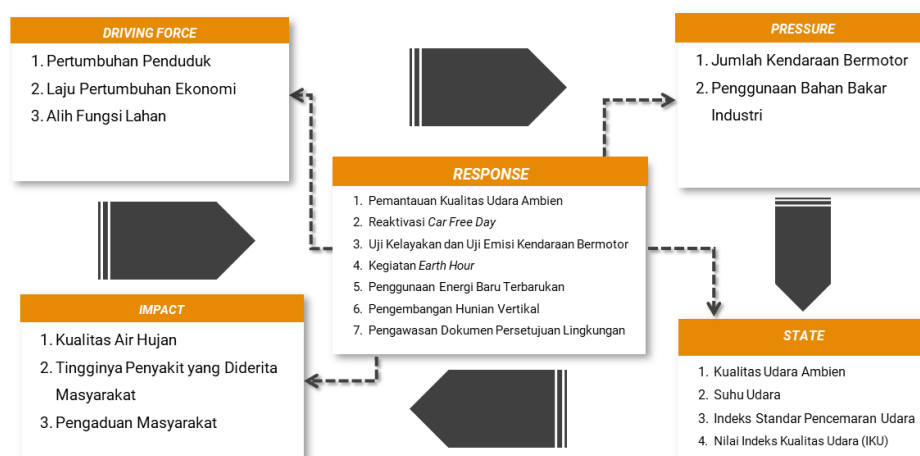
d) Penurunan Muka Air Tanah

2.2.5 *Response*

- a) Izin Mengelola Limbah B3
- b) Pemantauan Kualitas Air Sungai dan Air Sumur Berkala
- c) Program Penurunan Beban Pencemar Sungai
- d) Program Sanitasi berbasis Masyarakat
- e) Pengadaan Sumur Resapan
- f) Pengawasan Dokumen Persetujuan Lingkungan
- g) Rencana Aksi Pengendalian Pencemaran Program Nasional Citarum Harum

2.3 **Kualitas Udara**

Pertumbuhan industri, manufaktur, bisnis hingga mobilitas manusia memiliki potensi peningkatan emisi yang berpotensi mempengaruhi kualitas udara. Kerangka kerja analisis DPSIR Kota Cimahi terhadap isu kualitas udara dapat dilihat pada **Gambar 4**.



Gambar 4 Framework DPSIR Isu Kualitas Udara

2.3.1 *Driving Force*

- a) Pertumbuhan Penduduk
- b) Laju Pertumbuhan Ekonomi
- c) Alih Fungsi Lahan

2.3.2 *Pressure*

- a) Jumlah Kendaraan Bermotor

b) Penggunaan Bahan Bakar Sektor Industri

Faktor penekan perubahan kualitas udara ditimbulkan salah satunya dari kegiatan industri, manufaktur, bisnis hingga konstruksi. Di Kota Cimahi sebanyak 194 perusahaan di bidang industri besar dan sedang terdata menggunakan bahan bakar berupa Pelumas, Batubara, Bensin, Solar, Gas PGN, Gas LPG, dan Briket batubara (Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, 2020).

2.3.3 State

a) Kualitas Udara Ambien

Lokasi pemantauan kualitas udara pada tahun 2022 mencakup permukiman, transportasi, industri, dan perkantoran. Pengukuran kualitas udara di Kota Cimahi dilakukan pada perkantoran (Kantor di Kelurahan Cigugur Tengah), perumahan (Perumahan Pilar Mas), transportasi (PT Logam Bima), dan industri (PT Jenshiang Nusantara). Berdasarkan hasil pengukuran kualitas udara ambien dari 7 parameter uji, hanya parameter PM_{2,5} di kawasan perumahan yang melebihi baku mutu PP Nomor 22 tahun 2021.

b) Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU)

Dari perhitungan ISPU diperoleh bahwa kategori Tidak Sehat terjadi di Perumahan Pilar Mas dengan nilai ISPU pada parameter mencapai 151,1.

c) Indeks Kualitas Udara (IKU)

Nilai IKU di Kota Cimahi Tahun 2022 adalah 20, hal ini dapat disebabkan karena periode pemantauan kualitas udara yang dilakukan berbeda dengan tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2022 dilakukan periode pemantauan hanya dalam 1 kali periode dan 4 titik saja.

d) Suhu Udara di Kota Cimahi

Berdasarkan data bulanan selama kurun waktu tahun 2022, suhu rata-rata tertinggi terjadi pada Bulan September sebesar 32,2 °C. Walaupun tidak ditemukannya suhu ekstrem yang terjadi di Kota Cimahi, namun terjadi perubahan suhu yang cukup signifikan dibandingkan dengan tahun 2021 dan 2020.

2.3.4 Impact

a) Penyakit yang Diderita Masyarakat

Pencemar seperti PM₁₀ dan PM_{2,5} jika terhirup ke dalam sistem pernapasan menyebabkan gangguan pernapasan. Berdasarkan Dinas Kesehatan Kota Cimahi (2022), terdapat 64.608 penderita penyakit sistem pernapasan.

b) Kualitas Air Hujan

Gas SO₂ di udara dapat mengalami oksidasi sehingga membentuk SO₃ jika konsentrasi uap air sangat rendah, namun jika uap air di udara jumlahnya sesuai maka uap air tersebut akan bergabung membentuk tetesan asam sulfat (H₂SO₄).

2.3.5 Response

a) Pemantauan Kualitas Udara Ambien Berkala

b) Pengaktifasian Kembali *Car Free Day*

c) Uji Kelayakan & Uji Emisi Kendaraan Bermotor

d) Kegiatan *Earth Hour*

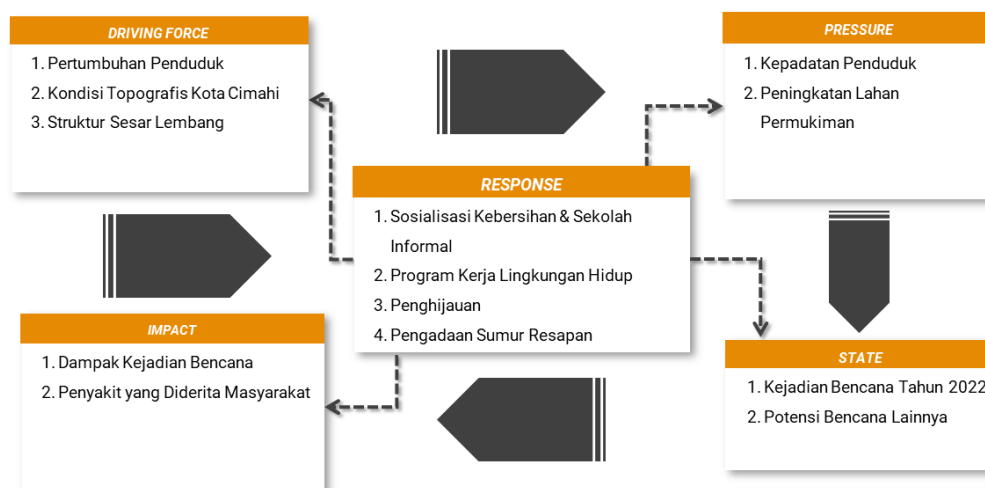
e) Penggunaan Energi Baru Terbarukan (EBT)

f) Pengembangan Hunian Vertikal

g) Pengawasan Dokumen Persetujuan Lingkungan

2.4 Risiko Bencana

Menurut Indeks Risiko Bencana Indonesia tahun 2021 yang dikeluarkan oleh BNPB, Kota Cimahi memiliki skor risiko bencana sebesar 91,71 dengan kelas risiko sedang. Kerangka kerja analisis DPSIR Isu Risiko Bencana dapat dilihat pada **Gambar 5**.



Gambar 5 Framework DPSIR Isu Risiko Bencana

2.4.1 Driving Force

- a) Pertumbuhan Penduduk
- b) Kondisi Topografis Kota Cimahi
- c) Struktur Sesar Lembang

2.4.2 Pressure

- a) Kepadatan Penduduk
- b) Peningkatan Lahan Permukiman
- c) Perilaku Masyarakat
- d) Lahan Kritis

2.4.3 State

- a) Kejadian Bencana

Selama tahun 2022, Kota Cimahi dilanda bencana beberapa bencana. Bencana tersebut belum terdata memakan korban jiwa, tapi perkiraan kerugian akibat bencana mencapai ±Rp9.583.340.955,00. Adapun bencana yang terjadi di Kota Cimahi yaitu bencana kebakaran, banjir, angin kencang, tanah longsor, gempa bumi, dan pergerakan tanah. Tercatat sebanyak 128 kejadian bencana yang terjadi di Kota Cimahi.

- b) Potensi Bencana Lainnya

2.4.4 Impact

a) Dampak Kejadian Bencana

Kota Cimahi dengan segala karakteristik daerahnya, sering dilanda oleh Angin Kencang. Kejadian angin kencang atau angin puting beliung sering terjadi di daerah dengan kondisi suhu udara yang tidak stabil. Kondisi topografi Kota Cimahi yang beragam terutama lahan yang curam berpotensi memicu risiko bencana tanah longsor.

b) Penyakit yang Diderita Masyarakat

2.4.5 Response

a) Penghijauan

b) Pengadaan Sumur Resapan

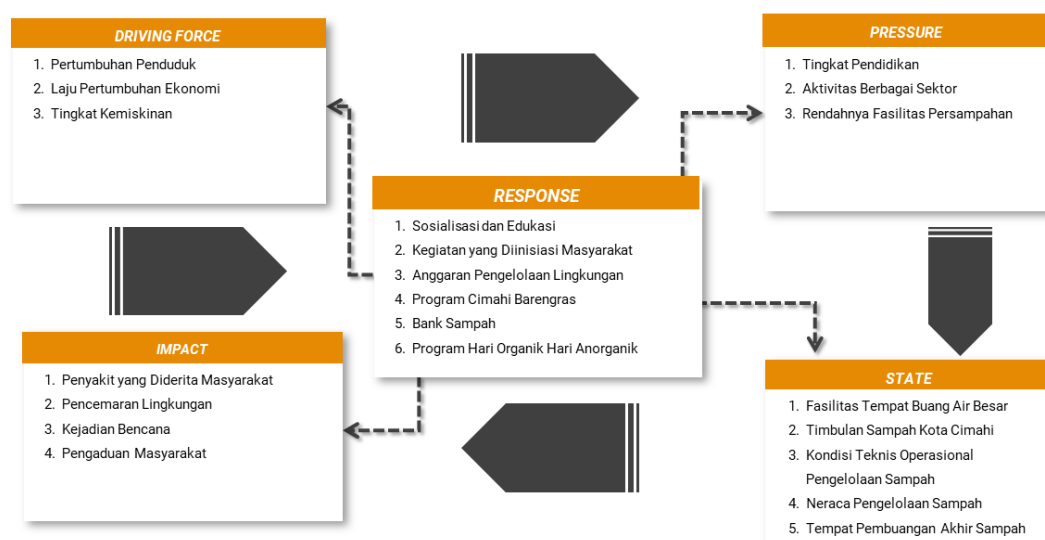
c) Inovasi Lingkungan:

- Cimahi Barengas
- Cimahi Walagri
- Pelestarian Kampung Adat
- Pemberdayaan Komunitas Lingkungan

d) Sosialisasi Kebersihan Lingkungan & Sekolah Formal

2.5 Perkotaan/Persampahan

Kerangka kerja analisis DPSIR isu perkotaan/persampahan dapat dilihat pada **Gambar 6**.



Gambar 6 Framework DPSIR Isu Perkotaan/Persampahan



2.5.1 *Driving Force*

- a) Pertumbuhan Penduduk
- b) Laju Pertumbuhan Ekonomi
- c) Tingkat Kemiskinan
- d) Perubahan Penggunaan Lahan

2.5.2 *Pressure*

- a) Tingkat Pendidikan
- b) Potensi Limbah Industri
- c) Rendahnya Fasilitas Persampahan

2.5.3 *State*

- a) Kurangnya Fasilitas Tempat Buang Air Besar

Fasilitas tempat buang air besar masyarakat di Kota Cimahi tercatat sebanyak 125.903 RT telah memiliki fasilitas tempat buang air besar sendiri di Kota Cimahi, dan sebanyak 8.490 RT memiliki tempat buang air besar bersama. Namun terdapat 27.424 RT yang masih membuang air besarnya ke sungai.

- b) Timbulan Sampah Kota Cimahi
- c) Kondisi Teknis Operasional Pengelolaan Sampah
- d) Neraca Pengelolaan Sampah di Kota Cimahi
- e) Tempat Pembuangan Akhir Sampah

2.5.4 *Impact*

- a) Penyakit yang Diderita Masyarakat
- b) Kejadian Bencana
- c) Pencemaran Lingkungan
- d) Pemanasan Global

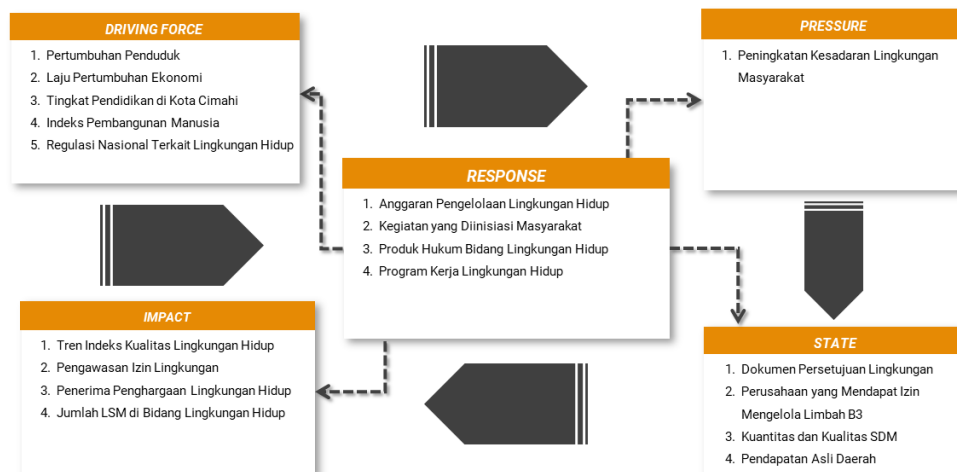
2.5.5 *Response*

- a) Sosialisasi dan Edukasi
- b) Kegiatan yang Diinisiasi Masyarakat
- c) Anggaran Pengelolaan Lingkungan
- d) Program Cimahi Barengras
- e) Bank Sampah

f) Program Hari Organik Hari Anorganik

2.6 Tata Kelola

Pada skala perkotaan, pengelolaan lingkungan hidup membutuhkan kolaborasi antar semua pemangku kepentingan. Kerangka kerja analisis DPSIR isu tata kelola dapat dilihat pada **Gambar 6**.



Gambar 7 Framework DPSIR Isu Tata Kelola

2.6.1 Driving Force

- a) Regulasi Nasional Terkait Lingkungan Hidup
- b) Jumlah Penduduk Kota Cimahi
- c) Peningkatan Laju Ekonomi
- d) Tingkat Pendidikan Masyarakat
- e) Indeks Pembangunan Manusia

2.6.2 Pressure

- a) Kesadaran Masyarakat Terhadap Lingkungan Hidup

2.6.3 State

- a) Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Manusia
- b) Jumlah Persetujuan Lingkungan yang Diterbitkan

Sepanjang tahun 2022, Pemerintah Kota Cimahi telah menerbitkan 109 dokumen izin lingkungan berupa Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) sebanyak 106 dokumen, Upaya Pengelolaan



Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) sebanyak 3 dokumen.

- c) Jumlah Perusahaan yang Mendapat Izin Mengelola Limbah B3
Selama tahun 2022, tercatat sebanyak 14 perusahaan yang baru memiliki izin mengelola limbah B3.
- d) Pendapatan Asli Daerah
Pendapatan asli daerah (PAD) Kota Cimahi di tahun 2022 adalah Rp233.606.934.522,00 dan mengalami penurunan dari tahun 2021.

2.6.4 Impact

- a) Pengawasan Izin Lingkungan
Pemerintah secara tegas memberikan sanksi terhadap pelanggar izin lingkungan. Pada tahun 2022, tercatat sebanyak 53 perusahaan telah dilakukan pengawasan terkait izin lingkungan.
- b) Jumlah LSM Bidang Lingkungan Hidup
Di Kota Cimahi selama tahun 2022 tercatat sebanyak 2 (dua) LSM yang bergerak di bidang lingkungan hidup. Kemunculan LSM di Kota Cimahi dapat dijadikan indikator bahwa tingkat kepedulian masyarakat terkait dengan isu lingkungan hidup masih ada.
- c) Penerima Penghargaan Lingkungan Hidup

2.6.5 Response

- a) Anggaran Pengelolaan Lingkungan Hidup
- b) Kegiatan yang Diinisiasi Masyarakat
- c) Produk Hukum Bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup
- d) Program Kerja Lingkungan Hidup

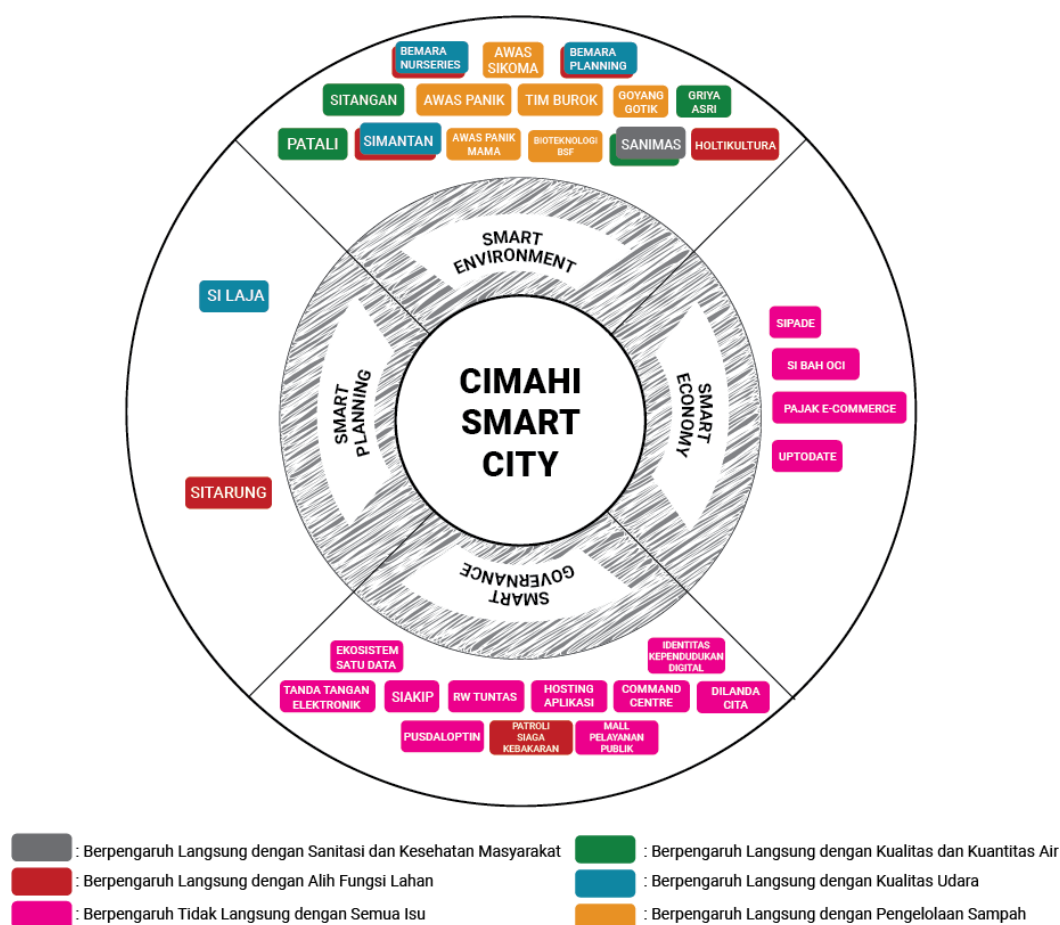
III. ISU PRIORITAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH

Penetapan isu prioritas dalam forum *Focus Group Discussion* (FGD), diawali dengan paparan materi kepada para *stakeholders* di Kota Cimahi dan dilanjutkan dengan sesi diskusi. Masukan dan saran para *stakeholder* menjadi respons baik bagi tim penyusun DIKPLHD Kota Cimahi Tahun 2023.

Penetapan isu prioritas dilakukan dengan pengisian formulir secara *online* (dalam jaringan) karena FGD kali ini dilaksanakan secara *hybrid*. Berdasarkan hasil diskusi, diperoleh bahwa 5 (lima) isu dengan nilai paling tinggi disetujui menjadi isu prioritas di Kota Cimahi. Berikut daftar isu prioritas di Kota Cimahi yang telah disepakati dan ditambahkan dengan *scoring* oleh Tim Internal Penyusunan DIKPLHD Kota Cimahi:

1. Kualitas dan Kuantitas Air
2. Pengelolaan Sampah
3. Kualitas Udara
4. Sanitasi dan Kesehatan Masyarakat
5. Alih Fungsi Lahan

IV. INOVASI DAERAH



Gambar 8 Inovasi Daerah Kota Cimahi Tahun 2023



4.1 Cimahi Smart City

Smart City adalah program-program Bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PUPR, Bappenas, dan Kantor Staf Kepresidenan. Pemerintah Daerah Kota Cimahi terpilih menjadi salah satu dari 50 Kota/Kabupaten di Indonesia yang dinyatakan lulus *Assessment* Gerakan Menuju 100 *Smart City* tahap kedua. Kota Cimahi sendiri dikenal sebagai salah satu kota yang giat mewujudkan *smart city*. *Smart city* merupakan sebuah visi pengembangan perkotaan untuk mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dan teknologi *Internet Of Things* (IoT) dengan cara yang aman untuk mengelola aset kota. Aset ini meliputi sistem informasi instansi pemerintahan lokal, sekolah, perpustakaan, sistem transportasi, rumah sakit, pembangkit listrik, jaringan penyediaan air, pengelolaan limbah, penegakan hukum, dan pelayanan masyarakat lainnya. *Smart city* ditujukan dalam hal penggunaan informatika dan teknologi perkotaan untuk meningkatkan efisiensi pelayanan

4.1.1 *Smart Environment*

4.1.1.1 PATALI

Sistem pelaporan berbasis *online* untuk pelaporan *monitoring* lingkungan yang dilakukan oleh pelaku usaha di Kota Cimahi. PATALI dibuat pada tahun 2018 dan mulai disosialisasikan dan digunakan pada awal tahun 2019. Banyaknya laporan yang menjadi kewajiban pelaku usaha serta *database* izin yang dimiliki pelaku usaha/kegiatan yang tidak tersusun dengan baik menjadi hambatan untuk instansi pengawas dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Cimahi dalam melakukan evaluasi pemantauan dan pengawasan pada pelaku usaha atau kegiatan. Adanya sistem informasi lingkungan membantu untuk merekap dan menyusun dokumen dan hasil pemantauan yang dimiliki oleh pelaku usaha.



4.1.1.2 SITANGAN

Pengembangan modul *Sistem Informasi Status Lingkungan Hidup* dilakukan untuk mendukung manajemen organisasi pemerintahan di lingkungan DLH Kota Cimahi serta dapat mengoptimalkan sumber daya manusia dan pelaksanaan ketentuan dalam PP No. 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam rangka penyelenggaraan layanan berbasis elektronik untuk peningkatan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien.

4.1.1.3 AWAS PANIK (Kawasan Tuntas Pilah Sampah Organik)

Pelayanan publik pada pelayanan persampahan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Cimahi diantaranya adalah AWAS PANIK (Kawasan Tuntas Pilah Sampah Organik). DLH Kota Cimahi telah menetapkan 2 kawasan pengelolaan sampah terpadu yang diberi *tagline* "AWAS PANIK". Kawasan tuntas pilah sampah organik adalah wilayah yang terintegrasi antara pemilahan, pengangkutan, pengolahan, dan pemanfaatan sampah dari warga dengan sistem pengelolaan sampah pada TPS 3R.

4.1.1.4 AWAS PANIK MAMA (Kawasan Tuntas Pilah Sampah Organik Maggotisasi Mandiri)

AWAS PANIK MAMA lebih mengedepankan pengelolaan mandiri di masyarakat, karena sampah hasil pilahan dari warga dikelola oleh kelompok masyarakat di Wilayah dengan sistem Maggotisasi, untuk itu perlu disiapkan sistem pengelolaan mandiri di masyarakat dan penambahan petugas pengelola sampah di kawasan yang disebut PENARI (PENgolah sAmpah oRganIk). Hasil dari pengelolaan sampah pun bisa langsung dirasakan oleh masyarakat sekitar, seperti hasil penjualan maggot, pemanfaatan maggot menjadi pakan ikan dan ternak, pupuk dari bekas maggot untuk tanaman Jahe dan Cabe, dan lain sebagainya. Lokasi pengembangan di 4 RW di Padasuka, 3 RW di Pasirkaliki, 2 RW di Cipageran, 1 RW di Melong, 3 RW di



Leuwigajah, 2 RW di Cibeber, 3 RW di Utama, 2 RW di Citeureup, 1 RW di Cimahi, 1 RW di Karang Mekar, 1 RW di Cibeureum, 1 RW di Cigugur Tengah, dan 1 RW di Setiamanah.

4.1.1.5 Pengolahan Bio Teknologi Maggot *BSF Padasuka*

Pengolahan Bio Teknologi Maggot *Black Soldier Flies* untuk mengurangi sampah organik menjadi kompos sehingga dapat mengurangi sampah organik serta budidaya maggot yang dapat digunakan sebagai pakan ternak. Pengolahan BSF atau Bioteknologi Maggot *Black Soldier Flies* ini dilaksanakan di Kelurahan Padasuka. Metode BSF efektif untuk mengurangi volume sampah, jadi metode ini bisa menjadi solusi permasalahan pengolahan sampah di Kota Cimahi. Pengembangbiakan *Black Soldier Flies* atau lalat hitam ini untuk menghasilkan maggot atau belatung. Belatung dari lalat hitam inilah nanti yang akan bekerja untuk mengurangi sampah, sehingga volume sampah akan berkurang dan mengurangi bau sampah

4.1.1.6 Tim BUROK (Buru Organik)

Tim BUROK adalah Tim yang dibentuk untuk melakukan penarikan sampah organik dari lokasi-lokasi yang memiliki potensi sampah organik akan tetapi belum mampu mengelola sampah organiknya secara mandiri seperti Pasar dan Pasar Swalayan. Sampah yang diambil oleh tim Burok selanjutnya akan di kelola di TPS 3R dan PDU yang ada di Kota Cimahi. dengan sistem penarikan sampah organik yang rutin dan terjadwal ini dapat mengurangi potensi penumpukan sampah di TPS yang ada di masing-masing lokasi. Pada Tahun 2022 ini ada pengembangan penambahan lokasi penarikan dari Resto/Rumah Makan sebanyak 32 titik.

4.1.1.7 AWAS SIKOMA (Pengembangan Kawasan Pengelola Sampah menuju Sirkular Ekonomi Mandiri)

Inovasi ini merupakan pengembangan kawasan pengelolaan sampah yang sudah ada, dimana kawasan ini diarahkan untuk pengelolaan sampah



dengan sirkular ekonomi agar dapat memberikan manfaat ekonomis bagi warganya. Pengembangan kawasan ini antara lain pemanfaatan sampah organik untuk pakan lele yang nantinya lele tersebut akan diolah menjadi Lele Siap Goreng (LESGO), Kerupuk lele, Kue berbahan dasar Lele, nugget Lele dan aneka olahan makanan dari lele lainnya. Selain itu sisa sampah pakan magot (kasgot) dimanfaatkan sebagai pupuk untuk tanaman cabe, jahe dan aneka rempah lainnya. Cabe hasil panen diolah menjadi sambal siap makan yang dikemas dengan menarik. begitu pula dengan jahe diolah menjadi aneka minuman berbahan jahe.

4.1.1.8 Kampung Holtikultura

Kelurahan Cimahi dan Kelurahan Cigugur Tengah, Pembentukan Kampung holtikultura, merintis pembentukan kampung hortikultura di kota Cimahi sebagai tempat budidaya, edukasi dan sebagai bangkitan ekonomi masyarakat di sekitarnya terutama dalam pengelolaan lanjutan dari hasil kampung hortikultura tersebut.

4.1.1.9 Bemara Nurseries

BEMARA NURSERIES (Pembibitan Tanaman Hias Berbasis Masyarakat) merupakan penataan lahan di lingkungan RW, Sekolah, dan perkantoran yang belum dimanfaatkan dan dikelola dengan baik; taman yang dibangun menjadi tambahan luas bagi taman kota dan akan di kelola oleh pemohon.

4.1.1.10 Bemara Planning

BeMara *Nurseries* pada tahun 2021 dikembangkan melalui *bemara planning*. Nama "**BeMara Planning**" (Perencanaan Taman **B**erbasis **M**asyarakat) diharapkan adanya pelibatan masyarakat dalam merencana akan meningkatkan kepedulian masyarakat saat dibangun dan dipelihara kedepannya, serta dengan adanya taman lingkungan, taman perkantoran, dan taman edukasi dapat menambah luas taman sebagai ruang terbuka publik di Kota Cimahi Penataan lahan di lingkungan RW, sekolah dan perkantoran yang belum dimanfaatkan dan dikelola dengan baik, taman



yang dibangun menjadi tambahan luas bagi taman kota dan akan direncanakan dan dikelola oleh pemohon.

4.1.1.11 Aplikasi SiMantan

Inovasi Sistem Informasi Manajemen Pertamanan atau SIMANTAN merupakan inovasi yang dilakukan oleh Dinas Perumahan dan Permukiman (DPKP) Kota Cimahi. Diadakannya sistem informasi manajemen dapat membantu pelaporan dan pengontrolan kerja petugas taman sehingga dapat terekam secara otomatis dalam sistem. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) berperan memaduserasikan kebutuhan pelaporan pemeliharaan taman di lapangan dalam suatu program inovasi berkelanjutan berbasis IT.

4.1.1.12 Griya Plus

Inovasi Griya Plus masih menjadi prioritas dalam mewujudkan kondisi rumah masyarakat. GRIYA artinya rumah, sedangkan PLUS adalah akronim dari Pastikan Layak Huni, Upayakan Sehat. Inovasi Griya Plus mewujudkan kondisi rumah masyarakat yang masuk dalam kategori Rutilahu (Rumah tidak layak huni) menjadi rumah yang layak huni dan menjadikan penghuninya sehat. Salah satu syarat hunian layak huni diantaranya adalah tersedianya sanitasi yang baik, dengan adanya sarana pengolahan air limbah domestik.

4.1.1.13 SANIMAS

Di Kota Cimahi sendiri sudah dibangun IPAL Sanimas sebanyak 118 unit dengan kapasitas rata-rata 50 KK yang melayani hingga 10.676 KK hingga tahun 2022. Pada tahun 2022, Pemerintah Kota Cimahi telah membangun sebanyak 14 unit Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik-Terpusat (SPALD-T) skala permukiman di beberapa kelurahan.

4.1.1.14 Goyang Gotik

Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) adalah pendekatan yang digunakan untuk mengubah perilaku higienis dan sanitasi melalui



pemberdayaan masyarakat dengan metode pemucuan. Sanitasi total adalah kondisi ketika suatu komunitas tidak buang air besar sembarangan (BABs) atau *Open Defecation Free* (ODF). Inovasi Goyang Gotik adalah akronim dari Gotong Royong Nabung *Kanggo* Tangki Septik. Goyang Gotik adalah suatu kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan cara menabung sampah yang bernilai guna untuk pembangunan tangki septik.

4.1.1.15 Pelestarian Kampung Adat Cireundeu

Masyarakat adat Cireundeu sangat memegang teguh kepercayaannya, kebudayaan serta adat istiadat mereka. Masyarakat ini punya konsep kampung adat yang selalu diingat sejak zaman dulu, yaitu suatu daerah itu terbagi menjadi tiga bagian, yaitu:

- a. Leuweung Larangan (hutan terlarang) yaitu hutan yang tidak boleh ditebang pepohonannya karena bertujuan sebagai penyimpanan air untuk masyarakat adat Cireundeu khususnya.
- b. Leuweung Tutupan (hutan reboisasi) yaitu hutan yang digunakan untuk reboisasi, hutan tersebut dapat dipergunakan pepohonannya namun masyarakat harus menanam kembali dengan pohon yang baru. Luasnya mencapai 2 hingga 3 hektar.
- c. Leuweung Baladahan (hutan pertanian) yaitu hutan yang dapat digunakan untuk berkebun masyarakat adat Cireundeu. Biasanya ditanami oleh jagung, kacang tanah, singkong atau ketela, dan umbi-umbian.

4.1.1.16 Uji Emisi Gratis

Uji emisi merupakan kewajiban setiap orang yang menghasilkan emisi dari alat transportasi (memiliki kendaraan) untuk mengetahui kinerja mesin dan tingkat efisiensi pembakaran dalam mesin kendaraan bermotor. Pemerintah Kota Cimahi pada tahun 2022 mengadakan uji emisi gratis yang melayani sebanyak 600 kendaraan atau 200 mobil dalam waktu 3 hari. Uji emisi gratis tersebut berlangsung mulai hari ini Selasa, 7 Juni 2022 sampai 9 Juni 2022, pada pukul 08.00 sampai 15.00 WIB. Berikut lokasi uji emisi



gratis Kota Cimahi pada tanggal 7-9 Juni 2022; Selasa, 7 Juni 2022 (di Jl. Gedung empat karang mekar); Rabu, 8 Juni 2022 (di Jl. HMS Mintaredja, SH Baros); dan Kamis, 9 juni 2022 (di Area parkir pasar Citeureup, Cimahi)

4.1.2 *Smart Economy*

4.1.2.1 SIPADE (Seputar Informasi Pajak Daerah)

Kota Cimahi adalah daerah yang mempunyai pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat. Pendapatan yang bersumber dari pajak daerah menyumbang kurang lebih 44% dari pendapatan yang ada. Instansi pengelola pendapatan daerah di Kota Cimahi adalah Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BAPENDA) dengan tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan sub urusan pendapatan yang menjadi kewenangan daerah kota.

4.1.2.2 Pembayaran Pajak via e-commerce

4.1.2.3 SI BAH OCI (Sistem Pelayanan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Online Kota Cimahi)

SI BAH OCI merupakan sebuah Aplikasi Mengenai Pelayanan seputar Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang berbasis *online* dimana sebelumnya berbasis pelayanan konvensional (terpadu di loket pelayanan). Proses pelayanan yang mengharuskan wajib pajak datang ke loket pelayanan BAPENDA Kota Cimahi dirasa tidak efektif dan efisien dalam hal waktu, serta perkembangan IT yang menuntut pelayanan serba cepat dan mudah.

4.1.2.4 UPTODATE

Aplikasi UPTODATE sebagaimana dimaksud berfungsi sebagai aplikasi Integrator dengan menggunakan teknologi interoperabilita dalam pertukaran data keuangan serta barang milik daerah. Aplikasi UPTODATE terdiri dari: Input, Proses, Output. Aplikasi UPTODATE telah disahkan berdasarkan Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 33 Tahun 2022 tentang



Integrasi Pengelolaan Data Keuangan Daerah melalui Aplikasi Uptodate pada Pemerintah Daerah Kota Cimahi.

4.1.3 Smart Planning

4.1.3.1 Si Tarung (Sistem Informasi dan Komunikasi Penataan Ruang)

Sistem Informasi dan Komunikasi Penataan Ruang sebagai pedoman pelaksanaan penataan ruang baik dari aspek perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang yang terintegrasi dengan Web Pemerintah Daerah Kota Cimahi dan dapat diintegrasikan dengan sistem lain yang berkaitan dengan penataan ruang. SITARUNG adalah Sistem Informasi Penataan Ruang, Aplikasi berbasis web GIS (*Geographic Information System*) yang menyajikan semua bentuk informasi di dalam hal penataan ruang dimulai dari perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian. Informasi/data yang disampaikan berbasis peta (spasial) yang dapat diakses oleh sektor terkait dan masyarakat, dan dapat dipergunakan dalam proses analisa sesuai dengan kebutuhan, termasuk untuk mengevaluasi tingkat kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTRW yang telah ditetapkan. Terdapat slot interaksi dengan masyarakat yang memungkinkan masyarakat untuk dapat melaporkan dengan mudah jika terdapat indikasi pelanggaran pemanfaatan ruang di lapangan dan dapat terdeteksi langsung lokasinya di dalam aplikasi SITARUNG.

4.1.3.2 Si Laja (Sistem Informasi Jalan dan Jembatan)

Sistem Informasi Jalan dan Jembatan sebagai pedoman pelaksanaan kebinamargaan baik dari aspek pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan yang terintegrasi dengan Web Pemerintah Daerah Kota Cimahi. SILAJA adalah singkatan dari Sistem Informasi Jalan dan Jembatan yang merupakan sebuah portal aplikasi berbasis *webgis* dengan informasi mengenai data Jalan dan Jembatan yang terdapat di Kota Cimahi. SiLAJA telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cimahi Nomor: 800/Kep.774-DPUPR/2021.

4.1.4 Smart Governance

4.1.4.1 SIAKIP

Aplikasi SIAKIP direncanakan untuk penginputan dokumen Sakip Perangkat Daerah dan SAKIP Kota guna mempermudah dalam mendapatkan informasi mengenai data SAKIP.

4.1.4.2 Patroli Wilayah Siaga Kebakaran

Unit kendaraan pancar dan penyelamatan berkeliling ke setiap ruas jalan yang ada di Kota Cimahi dengan tujuan memangkas waktu tanggap darurat ketika ada laporan kebakaran atau laporan darurat lainnya, terutama di jam lalu lintas padat. Dasar hukum inovasi ini adalah Perwal nomor 5 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, Bencana Alam, dan Bencana lainnya.

4.1.4.3 Sistem Pelaporan Berbasis Aplikasi *Smartphone Android* (*Whatsapp*)

Selain ke *line* telepon darurat, inovasi berikutnya yaitu setiap pelaporan baik itu kejadian kebakaran ataupun kejadian darurat lainnya bisa disampaikan melalui nomor *whatsapp* sehingga selain dapat melaporkan data kejadian juga bisa melengkapi data dengan dokumentasi (foto, video, *videocall*) serta bisa kirim lokasi secara instan melalui fitur *share loc*, dan juga akan sangat membantu petugas pada saat mengecek/konfirmasi kebenaran laporan tersebut.

4.1.4.4 Penerapan Tanda Tangan Digital

Penggunaan Sertifikat Elektronik Untuk Tanda Tangan Digital Dalam Mendukung Program *Go Green Office* telah diterapkan di beberapa sistem informasi di Kota Cimahi seperti di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan DPMPSTP. Ide dari penerapan tanda tangan digital adalah untuk menciptakan perkantoran yang *paperless* dengan membubuhkan tandatangan digital pada suatu *output* sistem (file dokumen) sebagai



keabsahan dokumen sehingga tidak perlu dilakukan tanda tangan manual pada kertas yang dicetak.

4.1.4.5 Penerapan Teknologi Kontainerisasi dalam Pengelolaan Hosting Aplikasi

Pengelolaan *hosting* aplikasi di lingkungan pemerintah daerah Kota Cimahi yang di kelola oleh diskominfo sudah menerapkan teknologi kontainerisasi dimana banyak aplikasi dapat di *deploy*/instalasi dalam satu server tanpa khawatir meluasnya dampak serangan *cyber* karena masing-masing aplikasi di bungkus dalam kontainer tersendiri. Pemanfaatan/optimalisasi server untuk banyak aplikasi ini dapat mengurangi jumlah server operasional sehingga dapat mengurangi konsumsi listrik yang berdampak pada dukungan terhadap *go green*.

4.1.4.6 Aplikasi Penyelenggaraan Satu Data Kota Cimahi (Ekosistem Satu Data Kota Cimahi)

Aplikasi ekosistem data Kota Cimahi merupakan portal terintegrasi untuk pengelolaan, keterbukaan dan kemudahan akses data bagi warga Kota Cimahi, terdiri dari Satu Data yaitu Platform untuk pengelolaan dan berbagi pakai data antar Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cimahi.

4.1.4.7 DILANDA CITA (Digitalisasi Layanan Dokumen Admindak Cimahi Kota)

4.1.4.8 Gerakan RW Tuntas

Program pelayanan Disdukcapil dimana petugas turun langsung ke lapangan (ruang lingkup RW) untuk melayani masyarakat dalam kelengkapan administrasi kependudukan. Inovasi ini melakukan pendataan dan pelayanan lebih akurat dan efektif, karena dimulai dari ruang lingkup yang kecil. Tujuan dari inovasi RW Tuntas adalah memaksimalkan pelayanan admindak guna mencapai program tuntas admindak.



4.1.4.9 IKD (Identitas Kependudukan Digital)

Teknik yang dikembangkan untuk sosialisasi dan pengaktifan Identitas Kependudukan Digital (IKD) secara efektif dan efisien menggunakan media sosial dan teknologi seperti *zoom*, *video conferens*, atau aktivitas jemput bola ke instansi pemerintahan. Pelaksanaan IKD ini menggunakan strategi dengan membuka layanan sampai tingkat kelurahan dan kecamatan serta pelaksanaan insidental jemput bola ke berbagai institusi pemerintahan, pendidikan, swasta, militer dan lain sebagainya.

4.1.4.10 MPP (Mall Pelayanan Publik)

Mal pelayanan publik dibangun untuk mempercepat pencapaian tujuan reformasi birokrasi, dengan memberikan kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, keamanan, dan kenyamanan kepada masyarakat dalam mendapatkan pelayanan meningkatkan daya saing global dalam memberikan kemudahan berusaha di Indonesia. Dilihat dari aspek lingkungan, Mal Pelayanan Publik juga memberikan manfaat positif bagi lingkungan di Kota Cimahi secara tidak langsung, yaitu meningkatkan angka kualitas udara. Mal Pelayanan Publik di Kota Cimahi menuju tahap akhir. Pembangunan mal pelayanan publik dibuat untuk mengoptimalkan pelayanan publik agar efektif dan efisien serta mendukung *Smart City* dalam pilar *Smart Governance*.

4.1.4.11 PUSDALOPTIN

PUSDALOPTIN merupakan pusat pengendalian operasional serta data dan informasi dalam pengelolaan sampah. PUSDALOPTIN ini dibentuk dengan tujuan agar terukurnya efisiensi dan efektivitas operasional pengolahan sampah, terstandarisasinya proses pengolahan sampah yang efektif dan efisien, tersedianya *realtime* data dan informasi pengolahan sampah, kemudahan penyusunan *roadmap* pengolahan sampah dan mitigasi pengolahan sampah.



V. PENUTUP

Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) Kota Cimahi adalah gambaran secara umum pengelolaan lingkungan hidup yang berisi informasi aktual dalam hal ini disampaikan dalam tahun 2022. Berdasarkan analisis isu lingkungan hidup dan isu prioritas yang telah dilakukan menggunakan pendekatan DPSIR, dapat disimpulkan beberapa hal, yakni:

- Isu prioritas lingkungan hidup di Kota Cimahi pada tahun 2023 adalah:
 1. Kualitas dan Kuantitas Air
 2. Pengelolaan Sampah
 3. Kualitas Udara
 4. Sanitasi dan Kesehatan Masyarakat
 5. Alih Fungsi Lahan
- Upaya Pemerintah Kota Cimahi dalam mengatasi isu lingkungan hidup prioritas dituangkan dalam bentuk Inovasi Daerah Kota Cimahi.

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan, rencana dan tindak lanjut termasuk yang berimplikasi kepada kebijakan Kepala Daerah yang perlu diperhatikan antara lain:

- Menjadikan isu prioritas terkait lingkungan hidup sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan dan perencanaan pembangunan Kota Cimahi.
- Berkoordinasi dengan instansi terkait mengenai pengelolaan lingkungan pada wilayah Kota Cimahi untuk mencapai nilai IKLH sesuai target RPJMD Kota Cimahi tahun 2017-2022.
- Merencanakan pembangunan berkelanjutan melalui program unggulan walikota, khususnya yang berkaitan dengan pelayanan publik dan sistem informasi berbasis elektronik untuk memberikan kemudahan pada masyarakat juga mengurangi emisi sektor transportasi.